

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan dinilai sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Pendidikan menjadi salah satu indikator berkembangnya suatu bangsa ke arah yang lebih baik yakni taraf pendidikannya yang tinggi. Dalam hal ini, pendidikan dituntut untuk lebih pro aktif memberikan perannya dengan terus memberikan pembenahan dalam berbagai aspeknya, mulai dari sarana-prasarana, materi pembelajaran, kurikulum, model pembelajaran, mutu guru dan siswa, serta hal-hal lainnya yang berkaitan erat dengan pendidikan. Untuk itu, pendidikan yang berkualitas baik, secara otomatis dapat mencetak bangsa yang maju, dimana warga negaranya memiliki komitmen yang kuat terhadap pembentukan jati diri bangsa serta mempunyai kemampuan untuk mengembangkan potensi diri. Undang-Undang Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 20 tahun 2003, pada pasal satu menyebutkan bahwa :

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Dari pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa peserta didik akan menunjukkan perannya, dalam hal ini hasil pendidikan yakni si terdidik mampu melaksanakan perannya sebagai diri sendiri, warga masyarakat, warga Negara dan sebagai pembentuk keluarga. Hasil pendidikan tersebut akan terlihat pada masa mendatang setelah berlangsungnya proses pendidikan dalam jangka waktu

tertentu. Untuk itu, Achmad Kosasih Djahiri (1985 : 3) mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :“Pendidikan merupakan upaya yang terorganisir, berencana, dan berlangsung secara terus menerus dan kontinyu, sepanjang hayat ke arah membina manusia atau peserta didik menjadi insan paripurna, dewasa, dan berbudaya (civiled)”. Hal tersebut sejalan dengan hakekat Pendidikan Politik yang dikemukakan oleh Kartini Kartono (1996 : 104), yakni : “Usaha belajar yang terus menerus dan berkesinambungan ; Peningkatan diri (eskalasi diri) dalam konstelasi politik ; Usaha meningkatkan masyarakat dan Negara”. Sedangkan yang dimaksud dengan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (UU SPN pasal 1 ayat 20). Hal tersebut senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Tim Pengembang MKDK Kurikulum dan Pembelajaran Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan FIP-UPI (2002 : 48) bahwa pembelajaran pada hakekatnya merupakan proses komunikasi transaksional yang bersifat timbal balik, baik antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka merealisasikan tujuan pendidikan di atas, maka perlu adanya program pembelajaran yang menjalankan pembinaan nilai (afektif). Pembelajaran sikap ini di Indonesia dalam pendidikan formal diserahkan melalui program pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh diproses guna melatih para siswa untuk berfikir kritis, analitis,

bersikap dan bertindak demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Sumantri, 2001 : 29). Selain itu, program pengajaran Pendidikan Kewarganagaraan (PKN) dirancang untuk memperkenalkan kepada siswa tentang bagaimana cara hidup bernegara serta bagaimana mengenal lembaga-lembaga tinggi negara dan bagaimana cara untuk berpartisipasi di dalamnya.

Pada akhir abad ke-20, Indonesia mengalami reformasi disegala bidang, termasuk dalam perubahan dalam sistem ketatanegaraannya. Di dalamnya terjadi lahirnya lembaga-lembaga tinggi negara baru, dimana salah satunya adalah Mahkamah Konstitusi (selain Komisi Yudisial dan Komisi Pemilihan Umum). Walaupun keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) ini sudah empat tahun dalam sistem ketatanegaraan kita, namun masih banyak warga negara yang kurang memahami bahkan tidak mengetahuinya, apalagi sampai dengan mengetahui dan paham benar dengan apa itu konstitusi, apa saja yang menjadi tugas dan wewenang MK dan hal-hal spesifik lainnya yang berkaitan erat dengan salah satu lembaga tinggi Negara kita ini.

Warga negara yang baik adalah warga negara yang paham benar tentang hak dan kewajiban dirinya sebagai anggota masyarakat. Sebagai salah satu elemen masyarakat, siswa dituntut untuk lebih mengenal hukum atau aturan apa saja yang berlaku di negara Indonesia. Konstitusi, di Indonesia disebut dengan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia, tidak boleh luput dari perhatian para siswa saat ini. Karena bagaimanapun, siswa sebagai generasi muda bangsa harus melek konstitusi, melek hukum dan tentu saja melek

politik. Istilah “konstitusi” sendiri masih dianggap sebagai hal baru, baik bagi para siswa maupun bagi masyarakat pada umumnya.

Materi pembelajaran konstitusi pada tiap jenjang pendidikan tentu saja berbeda-beda isinya. Hal ini disesuaikan dengan tingkat kemampuan analisis siswa. Pada penelitian kali ini, penulis akan membahas materi pembelajaran konstitusi pada mata pelajaran PKN di jenjang SMA (pendidikan menengah), khususnya kelas X akhir semester genap. Materi tersebut antara lain memuat tentang keterkaitan antara Dasar Negara dengan Konstitusi, substansi Konstitusi Negara, Perbandingan Konstitusi pada negara Republik Indonesia dengan negara Liberal dan negara Komunis, serta Kedudukan Pembukaan UUD 1945 NKRI. Di dalam muatan materi tersebut, terdapat keterkaitan dengan UUD 1945, yakni dalam Pembukaan (alinea 4), Isi pasal 2 sampai dengan pasal 16 dan pasal 19-23F tentang lembaga-lembaga tinggi negara, serta pasal 27 sampai dengan pasal 31(1) tentang berbagai hak dan kewajiban politik warga negara. Sehingga dengan mempelajari materi konstitusi dalam mata pelajaran PKN, dapat diharapkan siswa menjadi mengetahui dan memahami akan hak-hak dan kewajiban-kewajiban politiknya sesuai dengan UUD 1945, dan dari salah satu indikator tersebut harusnya dapat melahirkan sikap kesadaran politik siswa. Untuk itu, pada tahun 2006 Mahkamah Konstitusi yang bekerja sama dengan Jurusan PKN Universitas Pendidikan Indonesia menerbitkan buku Kesadaran Berkonstitusi untuk siswa, baik untuk tingkat SD, SMP maupun SMA. Buku tersebut dirancang sebagai buku materi pengayaan pembelajaran konstitusi di sekolah.

Kesadaran politik dinilai sangat penting dalam kehidupan keseharian siswa yang berperan sebagai salah satu elemen masyarakat. Karena dengan “berpolitik”, siswa dapat belajar memecahkan masalah yang dihadapinya. Selain itu, siswa juga dapat berlatih berpikir secara kritis. Melalui kesadaran berpolitik, siswa juga dapat mempelajari dan ikut serta dalam kehidupan bernegara, seperti mengamati pemilihan kepala daerah, ikut serta dalam pemilihan ketua OSIS dan lain sebagainya. PKN di sekolah berperan sebagai pendidikan politik bagi siswa, sebagaimana yang disebutkan oleh Kartini Kartono (1996 : xviii), salah satu tujuan pendidikan politik adalah membuat rakyat menjadi melek politik / sadar politik. Yang dimaksud dengan kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat ia hidup (Ramlan Surbakti, 1999 : 114).

Selain itu, kesadaran politik siswa juga dapat dibentuk salah satunya melalui pembelajaran PKN. Pendapat tersebut telah dipertegas oleh salah satu misi PKN yang dikemukakan oleh Bunyamin Maftuh dan Sapriya (2005 : 321) bahwa :

PKN sebagai pendidikan politik, yang berarti program pendidikan ini memberikan pengetahuan, sikap dan keterampilan kepada siswa agar mereka mampu hidup sebagai warga negara yang memiliki tingkat kemelekan politik (*political literacy*) dan kesadaran berpolitik (*political awareness*), serta kemampuan berpartisipasi politik (*political participation*) yang tinggi.

Untuk membangun kesadaran politik siswa, melalui program pembelajaran PKN, sekolah sebagai lembaga formal yang menyelenggarakan pendidikan telah memberikan penjelasan tentang Konstitusi, baik pada jenjang dasar maupun jenjang menengah. Materi pembelajaran tentang Konstitusi ini menurut penulis sangatlah menarik untuk dikaji.

Berdasarkan paparan di atas, penulis merasa sangatlah tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang kesadaran berpolitik siswa. Untuk itu, penulis akan melaksanakan penelitian dan berusaha melaporkan hasilnya dalam bentuk skripsi yang berjudul : **Studi Deskriptif Pembelajaran Materi Konstitusi pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) dalam Membentuk Kesadaran Politik Siswa SMA Lab. School UPI Bandung.**

1.2 Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian difokuskan pada peran materi pembelajaran konstitusi pada mata pelajaran PKN dalam menumbuhkan kesadaran politik siswa, dengan mengambil kasus pembelajaran PKN di SMA Lab. School UPI Bandung.

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka permasalahan penelitiannya adalah : “Bagaimana konstruksi normatif kesadaran politik menurut UUD 1945 ?”. Demi ketajaman analisis, rumusan masalah lebih lanjut dijabarkan pada sub-sub masalah berikut :

- a. Bagaimana muatan hak dan kewajiban politik warga negara dalam UUD 1945 (amandemen keempat) ?

- b. Bagaimana materi konstitusi dibelajarkan kepada siswa SMA Lab. School UPI Bandung ?
- c. Bagaimana respon siswa terhadap materi konstitusi dalam pembelajaran PKN ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini secara umum adalah memberikan gambaran mengenai konstruksi normatif kesadaran politik siswa SMA Lab. School UPI Bandung menurut UUD 1945. Secara lebih rinci, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana muatan hak dan kewajiban politik warga negara dalam UUD 1945 (amandemen keempat)..
- b. Untuk mengetahui dan memberikan gambaran secara terperinci mengenai pelaksanaan pembelajaran PKN, khususnya pada materi konstitusi.
- c. Untuk mengetahui bagaimanakah repons siswa setelah dibelajarkannya materi konstitusi tersebut.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat luas khususnya para pembaca tentang kesadaran politik siswa.
- b. Memberikan masukan kepada pihak sekolah (sebagai lembaga penyelenggara pendidikan formal) agar lebih mengorientasikan materi pembelajaran konstitusi sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan kesadaran politik siswa.
- c. Bagi dunia pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan atau pengetahuan tentang kesadaran politik siswa.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi acuan penulis dalam pelaksanaan penelitian ini akan terpusat pada beberapa pertanyaan penelitian yang telah disusun sebelumnya, antara lain :

1. Untuk masalah bagaimana muatan hak dan kewajiban politik warga negara dalam UUD 1945 (amandemen keempat), pertanyaannya adalah :
 - a. Apa saja yang menjadi hak-hak politik warga negara yang termuat dalam UUD 1945 (amandemen keempat) ?
 - b. Dalam pasal berapa saja hak-hak politik warga negara tersebut termuat dalam UUD 1945 (amandemen keempat) ?
 - c. Apa saja yang menjadi kewajiban-kewajiban politik warga negara yang termuat dalam UUD 1945 (amandemen keempat) ?
 - d. Dalam pasal berapa saja kewajiban-kewajiban politik warga negara tersebut termuat dalam UUD 1945 (amandemen keempat) ?

2. Untuk masalah bagaimana materi konstitusi tersebut dibelajarkan kepada siswa SMA Lab. School UPI Bandung, pertanyaannya adalah :

- a. Pada materi pokok apakah Konstitusi dibelajarkan kepada siswa ?
- b. Mengapa materi pembelajaran Konstitusi dianggap sulit dipahami siswa ?
- c. Apakah materi konstitusi yang diberikan di SMA Lab. School UPI Bandung dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran politik siswanya ?
- d. Kendala apa saja yang dihadapi oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran konstitusi dalam mata pelajaran PKN ?
- e. Bagaimana cara guru dalam mengatasi kendala tersebut ?

3. Untuk masalah bagaimana respon siswa setelah dibelajarkannya materi konstitusi, pertanyaannya adalah :

- a. Adakah respon positif siswa setelah dibelajarkannya materi konstitusi ?
- b. Bila ada, bagaimana bentuk-bentuk respon positif tersebut ?
- c. Adakah respon negatif siswa setelah dibelajarkannya materi konstitusi ?
- d. Bila ada, bagaimana bentuk-bentuk respon negatif tersebut ?
- e. Bagaimana cara menanggulangi / meminimalisir respon negatif siswa tersebut ?

1.5 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Suharsimi Arikunto, 2005 : 234). Hal serupa juga dipaparkan oleh Mohammad Nazir (1983 : 63) bahwa penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian tentang kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, atau sistem pemikiran ataupun suatu kejadian pada masa sekarang.

Seorang peneliti harus memahami tentang permasalahan yang timbul di lapangan. Untuk itu, penggunaan metode yang tepat sangatlah perlu ditekankan jika menginginkan hasil penelitian yang memuaskan. Atas dasar hal tersebut penulis memilih metode deskriptif dengan tujuan dapat menerangkan atau mendeskripsikan sejumlah variabel yang akan diteliti. Sesuai dengan metode penelitian tersebut, maka penelitian ini berusaha untuk memperoleh gambaran yang nyata tentang pembelajaran materi konstitusi dalam membentuk kesadaran politik siswa.

1.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya pengumpulan data, penulis berusaha dengan menggunakan beberapa cara, diantaranya adalah :

1. Observasi. Pelaksanaan observasi di lapangan, penulis akan melakukan pengamatan secara langsung ke lingkungan SMA Lab. School UPI Bandung.

2. Kuesioner / daftar pertanyaan yang disebarakan kepada siswa kelas X SMA Lab. School UPI Bandung, untuk mengetahui tanggapan atau sikap responden.
3. Studi kepustakaan. Dalam menggunakan teknik ini, penulis memperoleh teori-teori atau penjelasan mengenai konsep-konsep dan menggali segala informasi yang diperlukan dalam penelitian dari beberapa literatur yang relevan.
4. Wawancara. Dalam pelaksanaan penelitian ini, penggalan informasi dilakukan dengan berdialog langsung dengan responden atau nara sumber yang terpilih secara langsung serta dinilai dapat memberikan informasi yang dibutuhkan penulis, dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan. Teknik wawancara yang dilakukan adalah dengan menggunakan pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat dan tersusun secara garis besarnya saja, kemudian disesuaikan dengan apa yang akan ditanyakan.
5. Studi dokumentasi. Dengan memanfaatkan data dan informasi yang berhubungan dengan kesadaran politik siswa SMA Lab. School UPI Bandung.

1.7 Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengangkat dua variabel yang akan diteliti, yaitu (x) dan (y). Dimana variabel (x) berperan sebagai variabel yang mempengaruhi dan disebut dengan variabel bebas. Sedangkan variabel (y) berperan sebagai variabel yang dipengaruhi dan disebut dengan variabel terikat.

Variabel Bebas (x)	Variabel Terikat (y)
Pelaksanaan pembelajaran materi konstitusi	Kesadaran politik

1.8 Teknik Analisis Data

Langkah-langkah yang ditempuh dalam proses analisis data adalah melalui beberapa rangkaian kegiatan. Hal tersebut ditujukan untuk memperoleh data yang akurat demi tercapainya hasil penelitian seobyektif mungkin. Rangkaian kegiatan yang dimaksud, antara lain :

1. Seleksi data, yakni menyaring data yang diperoleh baik dari proses observasi maupun dari penyebaran kuesioner. Hal ini berguna untuk mengetahui mana data yang lengkap dan mana yang tidak lengkap, serta data mana yang dapat diolah dan mana yang tidak dapat diolah.
2. Klarifikasi data, adalah dengan mengelompokkan data sesuai dengan masalah yang diselidiki untuk mempermudah pengolahannya.
3. Tabulasi data, pada tahap ini sangat berguna dalam mempermudah penghitungan dan biasanya dibuat dalam bentuk tabel. Hal ini dimaksudkan

untuk mengetahui frekuensi setiap alternatif jawaban yang diberikan responden.

4. Penafsiran data, yakni dengan cara menafsirkan data mentah yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Tahap ini bertujuan untuk memberikan arti dan makna dari tiap pertanyaan yang dijawab oleh responden, sehingga dapat menjawab masalah penelitian. Adapun langkah-langkah dalam proses penafsiran data antara lain :

- a. Membuat tabel yang memuat nomor urut pertanyaan, alternatif jawaban, frekuensi jawaban dan persentase.
- b. Menyusun tolly, yakni menyusun setiap jawaban untuk mencari frekuensi.
- c. Menghitung frekuensi (f) dengan menjumlahkan hasil tolly.
- d. Mencari persentase (P) untuk mendapatkan gambaran seberapa besar frekuensi dari tiap jawaban dengan rumus :

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

keterangan :

P = Persentase jawaban

f = frekuensi jawaban

n = jumlah responden

100% = bilangan tetap

Keuntungan menggunakan persentase sebagai alat untuk menyajikan informasi adalah bahwa dengan persentase tersebut pembaca laporan penelitian akan mengetahui seberapa jauh sumbangan tiap-tiap bagian (aspek) di dalam keseluruhan konteks yang sedang dibicarakan. Dengan hanya mengetahui frekuensi saja kurang dapat ditangkap makna informasi di dalam keseluruhan

hasil penelitiannya (Suharsimi Arikunto, 2005:267). Jadi, seluruh langkah kegiatan di atas harus terlaksana sebaik mungkin, sehingga hasil informasi-informasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat dibaca dan dipahami dengan jelas serta dapat dimanfaatkan dikemudian hari.

1.9 Lokasi dan Subyek Penelitian

Subyek penelitian yang dipilih penulis adalah siswa SMA Lab. School UPI Bandung, yang beralamat di Jl. Dr. Setiabudhi Bandung. Adapun yang dijadikan alasan penulis memilih tempat penelitian ini antara lain karena sekolah tersebut berada di lingkungan kampus dan masih satu instansi dimana penulis tengah melaksanakan penelitian ini, sehingga memudahkan penulis dalam proses bimbingan penyusunan laporannya. Alasan lain yakni karena di sekolah tersebut penulis pernah melaksanakan penelitian salah satu tugas mata kuliah, sehingga dapat memperlancar proses dan pelaksanaan penelitian, karena setidaknya penulis telah mengenal sedikit banyak mengenai lingkungan serta iklim belajar di sekolah tersebut. Selain itu, sekolah ini dianggap cukup representatif untuk dijadikan objek penelitian. Populasi yang diambil adalah seluruh siswa SMA Lab. School UPI Bandung dengan sampel siswa kelas XI.

Adapun alasan penulis memilih jenjang SMA kelas XI sebagai sampel, karena pada kelas X semester akhir terdapat kelangsungan proses pembelajaran PKN, dimana di dalamnya pada semester genap akan dibelajarkan tentang materi konstitusi. Dengan begitu, dapat mempermudah penulis dalam proses pengumpulan data penelitian.

1.10 Jadwal Kegiatan Penelitian

Waktu Kegiatan	Bulan					
	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli
Penulisan Proposal	■					
Pembuatan Instrumen		■				
Mengurus Perizinan		■	■			
Percobaan Instrumen			■	■		
Implementasi Pembelajaran			■	■		
Observasi			■	■		
Kuesioner dan Wawancara				■	■	
Analisis Data					■	■
Penulisan		■	■	■	■	■

